

Penerapan program “Top-Down” Inpari 13 dalam menanggulangi ledakan hama wereng batang coklat di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten = Implementation Top-Down Programme Inpari 13 to overcome the outbreaks of brown plant hopper in Polanharjo District, Klaten Regency

Runy Setiyati Rahayu, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20332224&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini mengaji pengambilalihan peran pengambilan keputusan pengelolaan budi daya tanam padi dari tangan petani oleh pemerintah di lahan garapan individual petani. Fenomena itu terjadi pada saat Program “top-down” Inpari 13 berlangsung di Polanharjo. Penerapan Program Inpari 13 secara “top-down” menjadi fokus kajian karena peran pemerintah sebagai penentu kebijakan memiliki kekuasaan yang hegemonik dalam permasalahan pembangunan pertanian dalam hal ini menyangkut komoditas pangan. Program secara “top-down” diterapkan sebagai respons pemerintah Jawa Tengah dalam rangka mengamankan produksi beras karena adanya “bencana” akibat ledakan Wereng Batang Coklat (WBC) yang tidak tertanggulangi oleh keputusan individual petani. Program ini diterapkan di tengah kondisi petani yang telah mandiri dalam pengambilan keputusan. Dalam mengaji keberhasilan penerapan kebijakan Program “top-down” Inpari 13 itu, peneliti harus memerhatikan aktor-aktor yang berperan dalam proses pengambilan keputusan dan cara berbagai aktor itu mewujudkan program itu dari jajaran pemerintah di tingkat propinsi hingga tingkat petani. Skripsi ini juga memaparkan hasil evaluasi dan interpretasi yang dilakukan para pengambil kebijakan serta petani mengenai program Inpari 13.

.....This thesis examines in the taking over the roles in decision making at agricultural management from farmers by government in their individual rice field. That phenomenon occurred when the top down inpari 13 programme held on Polanharjo district. The implementation of the top down Inpari 13 programme was the main focus because the government's role as decision maker had the hegemonic power in the agricultural building issue in food commodity. The top down programme implemented as the response from the Central Java Government in case of saving the rice stock production because the "disaster" effect from the outbreak of brown planthopper that not overcome by farmers individual decision. This programme implemented in the middle of independent farmers in making some decisions. In examining the successful implementation policy of top down inpari 13 programme, researcher should watch the actors who had roles in the decision making process and in various ways of many actor to actualize that program from provincial government level into farmers level. This thesis also exposes the evaluation and interpretation from the policy decision maker and the farmer about the inpari 13 programme.